

ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) DAN DANA DESA (DD) TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS KAMPUNG BENDA KOTA TANGERANG)

Helda Yusita¹ Muhammad Rio²

Program Studi D-3 Manajemen Perusahaan

Politeknik Tunas Pemuda Tangerang

Jl. K.H.M. M. Dahlan, Tangerang, Banten, Indonesia

heldavusita@stie-triguna.ac.id¹, muhammadrio@stie-triguna.ac.id²

ABSTRAK

Program Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di kampung. Bantuan pembangunan kampung tersebut merupakan salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan di kampung dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya secara keseluruhan di wilayah Indonesia dengan mendorong dan menggerakkan potensi swadaya gotong royong. Untuk mengetahui pengaruh bantuan pembangunan kampung tersebut terhadap pelaksanaan pembangunan kampung, maka diadakan penelitian dengan metode wawancara yang menggunakan kuesioner terhadap responden sebanyak 10% dari jumlah kepala keluarga Benda. Dengan menggunakan alat analisa Uji Chi Square (X^2) dengan taraf uji $X^2_{0,01}$ dan $X^2_{0,05}$ dapat dibuktikan bahwa dana bantuan kampung mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan pembangunan kampung, khususnya di desa Benda Kecamatan Benda Kabupaten Tangerang. Adapun hasil perhitungan X^2 dari masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut: Pelaksanaan : $X^2_0 > X^2_t = 90,87 > 9,49$, Kebenaran : $X^2_0 > X^2_t = 96,16 > 9,49$, Sikap : $X^2_0 > X^2_t = 95,82 > 9,49$. Dan Uji Chi Square (X^2) ini dibuktikan pula oleh koefesien kontengensi dari variabel-variabel menunjukan hubungan yang erat dengan C 0,72% sedangkan 0,28% dipengaruhi oleh hal-hal lain. Hal ini diduga karena masyarakat belum sepenuhnya memahami akan tujuan dan hakekat dari pada pemberian Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) tersebut dari pemerintah. Untuk menanggulangi hal tersebut menurut hemat penulis dengan cara meningkatkan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dilain pihak pemerintah hendaknya dapat meningkatkan pemberian Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) setiap tahunnya.

Kata kunci : Alokasi Dana Kampung, Dana Desa, Uji Chi Square.

ABSTRACT

The Village Fund Allocation Program (ADK) and Village Fund (DD) are one of the government's efforts to improve the standard of living and welfare of the people in the village. The village development assistance is one of the government's policies in order to implement development in the village with the aim of increasing equitable distribution of development activities and their overall results in the territory of Indonesia by encouraging and mobilizing the potential of self-help mutual assistance. To determine the effect of village development assistance on the implementation of village development, a study was conducted using an interview method that used questionnaires on respondents as many as 10% of the total heads of Benda families. By using the Chi Square Test (X^2) analysis tool with test levels $X^2_{0.01}$ and $X^2_{0.05}$, it can be proven that village aid funds have a considerable influence on the implementation of village development, especially in Benda village, Benda District, Tangerang Regency. The calculation results of X^2 from each variable can be seen as follows: Implementation: $X^2_0 > X^2_t = 90.87 > 9.49$, Truth: $X^2_0 > X^2_t = 96.16 > 9.49$, Attitude: $X^2_0 > X^2_t = 95.82 > 9.49$. And the Chi Square Test (X^2) is also proven by the coefficient content of the variables showing a close relationship with C 0.72% while 0.28% is influenced by other things. This is allegedly because the community does not fully understand the purpose and nature of the Village Fund Allocation (ADK) and Village Fund (DD) from the government. To overcome this, according to the author, by increasing counseling to all levels of society. On the other hand, the government should be able to increase the allocation of Village Funds (ADK) and Village Funds (DD) every year.

Keywords: Village Fund Allocation, Village Fund, Chi Square Test.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat kampung berbagai upaya pemberdayaan masyarakat kampung secara terus menerus telah dilakukan, pertama melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam proses perubahan sosial; kedua penguatan pelayanan masyarakat oleh pemerintah kampung; ketiga pemantapan kelembagaan baik lembaga pemerintah kampung maupun lembaga kemasyarakatan dalam menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Kegiatan tersebut perlu ditunjang dengan dana serta ketersediaan sumberdaya bagi peningkatan sarana pelayanan masyarakat ditingkat kampung secara memadai. Untuk itu pemerintah kampung diberikan bantuan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) yang dananya diambil baik dari Dana APBD maupun dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Tangerang untuk digunakan secara maksimal bagi kepentingan sarana pelayanan masyarakat.

Pembangunan daerah baik dikampung maupun dikota adalah suatu kesatuan dengan pembangunan nasional. Dimana kampung merupakan tempat tinggal sebagian penduduk Indonesia. Oleh karena itu pembangunan kampung mempunyai

peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah ditetapkan bahwa perhatian sebesar-besarnya perlu diberikan pada peningkatan pembangunan pedesaan terutama melalui prakarsa dan swadaya masyarakat kampung, serta manfaat secara maksimal dana yang langsung diperuntukkan bagi pembangunan kampung. Hal ini dilakukan dengan memperkuat pemerintahan kampung agar mampu menggerakkan administrasi kampung yang semakin luas dan efektif, dengan menggunakan wadah-wadah penyalur pendapatan masyarakat kampung yang diatur dalam Undang-Undang pemerintahan kampung.

Pembangunan kampung dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Oleh karena itu pembangunan kampung mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat di kampung dan terdiri atas berbagai sektor dan program yang saling berkaitan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah daerah, sesuai dengan tugas pokok serta tanggung jawab masing-masing.

Untuk merangsang pembangunan pedesaan maka pemerintah telah mengambil langkah baru dengan memberikan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) yang jumlahnya dari tahun ketahun terus meningkat. Sebelum adanya Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) pembangunan pedesaan pembiayaannya bersumber dari Bandes dan swadaya masyarakat itu sendiri, dan dengan adanya bantuan tersebut maka diharapkan pembangunan pedesaan akan lebih lancar pelaksanaannya, setidaknya-tidaknya dana bantuan kampung mempunyai pengaruh terhadap pembangunan kampung.

Dana pembangunan kampung selain untuk meratakan pembangunan keseluruhan wilayah, juga untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat kampung, untuk tingkat perkembangan kampung dan perluasan lapangan pekerjaan dengan pembangunan prasarana kampung yang dapat menunjang kegiatan usaha perekonomian kampung. Proyek-proyek bantuan pembangunan kampung disesuaikan dengan prioritas di kampung masing-masing dan direncanakan oleh lembaga sosial kampung dengan memperhatikan kemampuan warga desa untuk berpartisipasi dan kemudian diputuskan melalui Musyawarah Bang Kampung.

Letak Geografis Kecamatan Benda:

- Utara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan
- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungkai Selatan Lampung Utara
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Pakuan Ratu
- Timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar dan Gunung Terang.

Sedangkan keadaan geografis Kecamatan Benda Kabupaten Tangerang adalah merupakan pemekaran dari Kecamatan Pakuan Ratu, yang didefinisikan dan dirubah namanya dari Kecamatan Pakuan Ratu Tengah menjadi Kecamatan Bendapada Tanggal 6 Februari 2001, yang dilanjutkan pada penyerahan aset pada tanggal 15 Maret 2001. Luas wilayah kerja pemerintahan : 72240 Ha., Jumlah penduduk : 6419 KK - (27885 jiwa), dengan jumlah penduduk miskin : 5777 KK. (90%).

Sumber Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD), untuk setiap kampung didapat dari alokasi keuangan Kabupaten Tangerang baik dari alokasi dana APBD maupun dari sumber alokasi lainnya. Oleh karena pembangunan dewasa ini pada dasarnya berada di kampung-kampung, maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan bagi berhasilnya usaha pembangunan yang dilaksanakan. Partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat Kampung dalam pembangunan, baik dari segi material maupun spiritual, sehingga semakin besar partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan, maka semakin meningkat hasil pembangunan yang dicapai.

Disamping partisipasi aktif masyarakat pedesaan faktor-faktor lain yang dapat menunjang keberhasilan dan peningkatan hasil pembangunan adalah swadaya masyarakat. Swadaya dan gotong royong masyarakat memberi warna khas terhadap lajunya pembangunan kampung.

Dewasa ini pemerintah sedang mengadakan usaha-usaha pembangunan dalam rangka peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat kampung. Usaha-usaha tersebut disebut Usaha Bantuan Kampung. Bantuan Kampung adalah bantuan yang langsung diberikan kepada desa atas beban Anggaran Pendapatan baik Belanja Daerah maupun dari Belanja Negara, untuk membangun proyek-proyek dalam lingkungan kampung. Bantuan untuk kampung tersebut bertujuan untuk mendorong atau menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Disamping itu diharapkan untuk dapat membantu desa dalam rangka usaha perluasan, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Demikian juga halnya Kampung Bendayang telah mendapat bantuan dana pembangunan Kampung, yang kalau dilihat setiap tahunnya terus meningkat, untuk jelasnya lihat tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Jumlah Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) untuk Kampung Bendaselama 5 tahun dari tahun 2010 – 2014.

No	Tahun	Jumlah ADK	Dana Pembinaan Kec./Kampung
1.	2010	7.500.000,-	384.615,38
2.	2011	8.500.000,-	576.923,08
3.	2012	10.000.000,-	769.230,77
4.	2013	12.000.000,-	1.153.846,15
5.	2014	10.000.000,-	769.230,77

Sumber : Kantor Kecamatan Benda 2015.

Dari jumlah Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD), yang diperoleh Kampung Bendadari bantuan Pemerintah Kabupaten Tangerang, mengalami peningkatan dari tahun ketahun namun pada Tahun 2014 mengalami penurunan karena harus disesuaikan dengan PAD Kabupaten Tangerang, pada tahun tersebut untuk pengalokasian Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) yang didapat oleh Kampung Bendatersebut telah dilaksanakan pembangunannya sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang disusun melalui Musyawarah Bang Kampung Benda. Sedangkan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) yang dipergunakan untuk pembangunan fisik terlihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Jumlah Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) Untuk Pembangunan Fisik di Kampung Bendatahun 2010 – 2014

TAHUN	PEMBANGUNAN/ KEGIATAN FISIK	JML ADK	SWADAYA
2010	Perbaikan/perubahan papan2 nama Kab. dan nama Kec.	Rp.2.500.000	-
2011	Rehab Balai Adat (Sesat Peranti Gawi) Pemasangan Pondasi & Pema -	Rp.3.000.000	Rp. 7.000.000
2012	garan keliling Kantor kepala - kampung & Gorong2 Dua unit. Program Pembuatan Gorong2	Rp.3.500.000	Rp. 5.000.000
2013	perumahan masy.Dusun Cabang Tiga sebanyak 35 unit. Rehab Balai Adat Kamp. dan	Rp.4.000.000	Rp.10.000.000
2014	pemasangan keramik	Rp.5.000.000	Rp.10.000.000

Sumber : Kantor Kepala Kampung Benda2015.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dari Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) tersebut adalah dilaksanakan melalui proses musyawarah pembangunan kampung (Musbangkam).

Sesuai dengan hakekat dan mekanisme pembangunan masyarakat kampung yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Maka pembiayaan bersumber atas dasar imbalan antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu masalah yang menyebabkan kurang lajunya pengembangan sampai saat sekarang ini ialah karena kekurangan modal yang riil.

Modal riil adalah modal yang siap dipakai untuk dapat membiayai pembangunan walaupun modal riil kurang tetapi modal potensial cukup banyak tersedia. Modal potensial ini jika belum digali atau diusahakan, maka belum dapat berguna bagi pembangunan kampung.

Masyarakat kampung sebagai unit pemerintahan terkecil dalam melaksanakan pembangunan juga selalu mengalami kekurangan modal riil. Sehingga untuk membangun sarana dan prasarana ekonomi kampung selalu mengalami hambatan-hambatan. Jalan keluar untuk mengatasi kesulitan ini dapat diperoleh dari masyarakat itu sendiri, yaitu dengan jalan mengubah modal potensial yang tersedia menjadi modal riil. Yang menjadi masalah sekarang ialah bagaimana caranya mengubah modal potensial tersebut menjadi modal riil yang dapat langsung untuk melaksanakan pembangunan tersebut.

Untuk mengubah modal potensial menjadi modal riil di bawah ini penulis kutipkan pendapat Prof. DR Sumitro Djojohadikusumo: Ekonomi pembangunan, PT. Pembangunan Jakarta 1980 cetakan ke-30 halaman 23:

“Guna merubah sumber-sumber alam dan kekayaan alam potensi menjadi sumber alam dan kekayaan alam riil diperlukan suatu tehnik dan skills. Pengertian skills ini tidak terbatas pada keahlian tehnik semata-mata yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang menggunakan alat-alat modern, juga kecerdasan untuk mengatur dan memimpin perusahaan-perusahaan ataupun organisasi-organisasi lain”.

Dan justru inilah yang umumnya tidak dimiliki oleh negara lain yang sedang berkembang. Oleh karena itu negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, diharuskan untuk mewujudkan pembangunan secara merata sampai kekampung-kampung dengan melalui perluasan kesempatan kerja, menyebar luaskan hasil-hasil pembangunan secara merata sampai kekampung-kampung, dengan sendirinya kemiskinan akan berkurang.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai bagian dari keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat.

Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik dan kebudayaan. Dengan adanya pembatasan diatas maka pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai berikut:

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Dapat dilihat dari definisi diatas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting yaitu:

- Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus menerus.
- Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan perkapita.
- Pembangunan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan perkapita itu harus berlangsung dalam jangka panjang.

Dalam analisis pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses yang saling berkaitan dan berhubungan serta mempengaruhi antara faktor- faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi. Dengan analisis ini dapat diketahui deretan peristiwa yang timbul yang akan mewujudkan peningkatan dalam kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari suatu pembangunan ketahap berikutnya.

Selanjutnya pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena kenaikan itu merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pada akhirnya suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang meningkat. Ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus menerus. Perang, kekacauan politik dan kemunduran sektor ekspor misalnya dapat mengakibatkan suatu perekonomian mengalami kemunduran dalam tingkat kegiatan ekonominya. Jika keadaan demikian hanya bersifat sementara dan kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ketahun, maka masyarakat tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan pembangunan ekonomi.

Selanjutnya untuk mewujudkan cita-cita tersebut pemerintah mengambil suatu langkah kebijaksanaan dengan peningkatan pembangunan kampung. Sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang yaitu: Pembangunan Nasional dijalankan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. (GBHN)

Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, seperti : pangan, sandang, perumahan kesehatan, dan sebagainya atau kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan dan sebagainya, melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya, bahwa pembangunan itu merata diseluruh tanah air, bukan hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup, yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan kita. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari pembangunan nasional secara ringkas disebut dengan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Strategi pembangunan kampung jangka panjang adalah :

Mengembangkan seluruh kampung di Indonesia menjadi kampung swasembada melalui tahap- tahap pengembangan kampung swadaya dan kampung swakarsa dengan memperhatikan keserasian hubungan antara daerah pedesaan dan perkotaan, imbang kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara berbagai program sektoral/regional/inpres dan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah Indonesia.

Sasaran pembangunan kampung dalam jangka pendek adalah sebagai berikut:

Menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan sektor-sektor yang menjadi prioritas kampung untuk meningkatkan produksi, perluasan lapangan kerja, pemerataan penyebaran penduduk, pengembangan koperasi, keluarga berencana, pendidikan dan kesehatan.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembangunan kampung adalah untuk menetapkan landasan yang kokoh dan kuat bagi masyarakat kampung untuk berkembang atas kekuatan dan kemampuan diri dalam melaksanakan pembangunan kampungnya. Sedangkan peranan pemerintah dalam hal ini hanyalah memberikan bantuan, pengarahan bimbingan dan pengendalian yang dapat meningkatkan usaha swadaya gotong royong masyarakat kampung untuk tumbuh dan berkembang dari kampung swadaya menjadi kampung swakarya kemudian menjadi kampung swasembada.

2.2. Pengertian Pembangunan Kampung

Pada umumnya pembangunan kampung adalah merupakan salah satu usaha dalam mencapai tujuan negara yaitu suatu masyarakat adil dan makmur, sejahtera material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Pembangunan tersebut diusahakan oleh masyarakat kampung sendiri dengan cara swadaya dan gotong royong dengan bantuan pemerintah baik material maupun bimbingan disegala bidang. Adapun yang disebut dengan pembangunan masyarakat kampung adalah:

“Suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan dan penghidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat sendiri, namun belum ada inisiatif, adalah tugas pemerintah untuk menumbuhkannya. Bantuan pemerintah pada pokoknya bersifat pendorong/perangsang. Dengan demikian pembangunan akan berhasil baik jika masyarakat ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya”.

Rencana program pembangunan yang ada di daerah-daerah adalah merupakan kerangka dari pola umum pembangunan nasional. Segala usaha pembangunan dilaksanakan dengan sistem kebijaksanaan dan pendekatan-pendekatan yang terarah dan berencana dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kampung. Dalam pembangunan kampung dimana terdapat dua unsur dalam prosesnya yaitu partisipasi masyarakat serta bantuan dan bimbingan dari pemerintah. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa tujuan pembangunan kampung secara terperinci adalah:

Meningkatkan taraf kehidupan warga kampung kepada dinamika alam kemajuan, terutama dalam arti cara berfikir dan penyelesaian masalah secara lebih maju dan dinamis serta efisiensi.

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut diatas maka pelaksanaan pembangunan kampung diarahkan pada sasaran :

- Pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kampung.
- Pembangunan yang bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran, cara berfikir dan cara kerja.

Sesuai dengan struktur dan sistem pemerintah Negara Indonesia, maka dalam rangka menyelenggarakan pembangunan kampung yang dilaksanakan oleh pemerintah berjalan melalui tingkat-tingkatan yakni : Pada tingkat pusat yaitu Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah yaitu Gubernur Kepala Daerah, Bupati/ Walikota Madya Kepala Daerah, Camat dan kemudian Kepala Desa/Kampung (5:79)

Terselenggaranya pembangunan dikampung itu semata-mata tergantung adanya prakarsa swadaya dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu kepala kampung sebagai pemimpin di kampung harus dapat berusaha membangkitkan semangat masyarakat untuk berprakarsa dan berpartisipasi didalam pembangunan terutama dalam sikap mental masyarakat untuk dapat menerima usaha pembaharuan.

2.3. Program Pembangunan Kampung

Kampung yang merupakan suatu wilayah yang didiami oleh sebagian besar penduduk Indonesia, sebagai kesatuan masyarakat hukum sebagai organisasi pemerintah terendah, mempunyai hak otonomi kampung. Hak yang dimiliki kampung adalah merupakan landasan pemerintah kampung, termasuk juga didalamnya adalah kewenangannya dalam menentukan program pembangunan dan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Program pembangunan sebagai rangkaian kegiatan pembangunan yang terdiri dari:

- a. Kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek Pembangunan Nasional.
- b. Kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah diluar yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat.
- c. Kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan kampung diluar yang direncanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada dasarnya semua kegiatan proyek pembangunan, baik itu Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah dan pembangunan kampung, hanyalah berbeda didalam ruang lingkup pembiayaan dan cara pelaksanaannya.

Mengenai proyek-proyek nasional yang berada didaerah pertanggung jawaban pelaksanaannya sepenuhnya berada ditangan Departemen Operasional yang bersangkutan, sedang pembiayaannya juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam hubungan ini maka gubernur/kepala daerah ikut serta bertanggung jawab akan suksesnya setiap proyek pembangunan yang ada didaerahnya. Sedangkan proyek pembangunan daerah yang belum dimasukkan kedalam rencana pembangunan nasional, sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, termasuk pembiayaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk menentukan tempat lokasi proyek pembangunan daerah dipakai beberapa azas pertimbangan dalam daerah, yaitu:

- Azas efisiensi dimaksudkan untuk mencapai efisiensi dalam pemilihan lokasi
- Azas pembangunan antar daerah dimaksudkan untuk menghindari perbedaan kemakmuran serta tingkat kemajuan yang terlalu besar antar daerah-daerah.
- Azas pertimbangan dalam daerah, dimaksudkan mengenai investasi yang setepat-tepatnya bagi suatu daerah sehingga tercipta suatu keserasian ekonomi daerah yang bersangkutan.

Proyek pembangunan Nasional yang berada dikampung, tanggung jawab pembiayaannya dan pelaksanaannya berada pada pemerintah pusat. Tetapi dalam hal penciptaan kesejahteraan masyarakat maka kepala kampung/masyarakat membuat dan menentukan sendiri pembangunan yang tidak termasuk dalam proyek Nasional. Untuk proyek yang demikian itu ada suatu ketentuan mengenai tanggung jawab pelaksanaan dan pembiayaannya yaitu proyek pembangunan kampung yang tidak termasuk dalam proyek pembangunan nasional dan pembangunan daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kampung, termasuk pembiayaannya dengan tidak menutup kemungkinan menerima bantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan kampung itu adalah suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan jalan partisipasi dari masyarakat itu sendiri atas bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Untuk itu yang menjadi sasaran dari pembangunan kampung meliputi : Pembangunan prasarana fisik dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan kampung, khususnya perekonomian masyarakat pembangunan sikap mental dalam rangka meningkatkan dan memantapkan partisipasi aktif masyarakat dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan, tercermin dalam perubahan sikap mental, pandangan hidup, cara berfikir dan cara kerja terwujud dalam pengabdian tanpa pamrih kepada usaha pembangunan yang berlangsung dikampung-kampung.

Pembangunan kampung dilakukan dalam rangka mengisi dan meletakkan dasar-dasar bagi suatu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Maka tindakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah difokuskan pada daerah perkampungan. Yang sasarannya ditetapkan pada perubahan sikap mental dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan bagi masyarakat kampung. Pembangunan kampung dilaksanakan dalam rangka menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari pemerintah dan masyarakat.

Wewenang atas kekuasaan negara serta pola dan cara mengendalikan kebijaksanaannya sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu banyak tergantung dari tabiat dan sikap kelakuan golongan kepemimpinan masyarakat yang menguasai wewenang kebijaksanaan negara. Maksudnya adalah agar wewenang kekuasaan negara ini dipergunakan sedemikian rupa sehingga negara melakukan peranan sebagai saluran pelaksanaan untuk kepentingan masyarakat berdasarkan kemampuan kepemimpinan masyarakat untuk menghayati perasaan yang hidup dalam pergaulan. Dengan demikian peranan negara akan dirasakan oleh umum sebagai saluran pengabdian untuk kehendak masyarakat dan untuk kepentingan rakyat banyak.

Dalam hal kewajiban pemerintah menyediakan fasilitas untuk penyediaan prasarana-prasarana serta memberikan bimbingan dan pengawasan. Sedangkan masyarakat berkewajiban membantu pelaksanaannya pembangunan sesuai dengan kemampuan yang ada pada masyarakat tersebut. Disamping itu pemerintah berusaha memberikan bantuan material kepada kampung dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung. Walaupun pembangunan kampung itu merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, namun pembangunan kampung itu mempunyai ciri khas tersendiri dibanding dengan pembangunan yang lain.

Adapun menurut Taziludin Narana dalam bukunya yang berjudul “ Metodologi penelitian pembangunan kampung” menyebutkan bahwa dari ciri-ciri khas sasaran-sasaran pembangunan kampung antara lain:

1. Pembangunan masyarakat kampung berarti membangun manusia tradisional menjadi manusia modern yaitu manusia yang antara lain:
 - a. Bersedia mengalami hal-hal baru.
 - b. Terbuka bagi perubahan-perubahan.
 - c. Mampu membentuk, memiliki dan mengajukan pendapat sendiri.
 - d. Demokrasi dalam menanggapi pendapat orang lain.
 - e. Berorientasi pada masa kini dan masa depan tidak pada masa lalu.
 - f. Mampu melaksanakan perencanaan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat kampung yang bersangkutan dalam proses pembangunan proyek yang bersangkutan, pembangunan itu bukanlah pembangunan kampung.
3. Metode pendekatan pembangunan kampung adalah telah disesuaikan dengan kondisi-kondisi fisikologis, sosial dan ekonomis dari pada setiap lingkungan kebudayaan dimana kampung yang bersangkutan berada.
4. Proses pembangunan kampung suatu perencanaan dan diorganisasikan guna membantu anggota masyarakat untuk memperoleh sikap keterampilan dan pengertian yang diperlukan untuk mampu berpartisipasi aktif. Pembangunan kampung adalah proses pendidikan.
5. Pembangunan masyarakat berarti juga membangun prasarana dan lingkungan hidup yang serasi.
6. Pembangunan masyarakat bermaksud membangun rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pembangunan kampung dikatakan berhasil jika ada:

Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan, kemampuan masyarakat untuk berkembang telah dapat ditingkatkan dan ditumbuhkan dan jika prasarana fisik serta lingkungan hidup yang serasi telah dapat dibangun dan dipelihara.

2.4. Peranan Kepala Kampung Dalam Pembangunan Kampung

Adapun kewajiban kepala kampung menurut undang-undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari No.5 tahun 1974, tentang pokok –pokok Pemerintah Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Kampung adalah pengembian dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban. Dengan perkataan lain kepala kampung adalah administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada organisasi pemerintahan kampung.

Sebagai pemimpin yang diangkat oleh pemerintah Kabupaten maka kepala kampung adalah pemimpin dalam arti formal, yang berhak menetapkan keputusan kampung dan melaksanakan keputusannya. Jika ditinjau dari segi Ilmu Tata Negara, kepala kampung adalah menjalankan tugas Legislatif dan Eksekutif.

Agar pembangunan kampung itu berjalan lancar maka untuk itu partisipasi masyarakat harus dibimbing oleh pimpinannya. Kepala kampung menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah kampung yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan kampung, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan kampung.

Dengan demikian fungsi kepala kampung terhadap pembangunan kampung sebagai pemikir, perencanaan dan pelaksana pembangunan kampung. Kepala kampung sebagai pemimpin pemerintahan kampung bertugas membantu menyelenggarakan termasuk menyiapkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh instansi-instansi dalam perluasan peningkatan pelayanan dikampung itu.

Kepala kampung adalah merupakan tempat tumpuan segala urusan dari segenap urusan pemerintahan yang berada diatasnya, oleh karena itu kepala kampung berkewajiban menampung dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat, serta memimpin usaha pembangunan kampungnya, disamping itu harus menghadapi arus dan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Kepala kampung dan seluruh perangkat kampung mejadi penentu dalam keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan. Kepala kampung berkewajiban membangun mental masyarakat kampung baik dalam menumbuhkan maupun dalam mengembangkan semangat kekeluargaan.

Selain itu kepala kampung juga merupakan sesepuh masyarakat yang menjadi tempat bernaung dan bertanya dalam segala urusan dan kepentingan masyarakat. kepadanya dibebankan pula peraturan perundang- undangan untuk melakukan pemerintahan umum termasuk keamanan, ketertiban dan tugas pembantu lainnya.

2.5. Tujuan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) Dari Pemerintah

Adapun maksud dan tujuan Pemerintah memberikan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) dapat dilihat dari petunjuk pelaksanaan dana pembangunan kampung sebagai berikut:

-
1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Kampung sebagai wujud pelayanan masyarakat pada tingkat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
 2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan ditingkat kampung untuk menampung, menyalurkan aspirasi, mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan serta mampu mengelola pembangunan secara mandiri, dengan mendaya gunakan sumber daya lokal dan sumber daya pembangunan secara optimal.
 3. Meningkatkan kemampuan lembaga pengelola keuangan dan lembaga usaha milik masyarakat dalam rangka peningkatan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.

Dengan demikian jelas bahwa pemerintah memberikan bantuan dana pembangunan kampung kepada setiap kampung diseluruh Indonesia untuk merangsang, menumbuhkan dan memupuk usaha swadaya masyarakat dalam membangun kampungnya. Sehingga diharapkan nantinya setiap kampung dapat mencapai tingkat kampung swasembada.

Peranan utama dalam pembangunan kampung terletak pada masyarakat itu sendiri sehingga arti Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) makin lama dapat dirasakan. Dan dana pembangunan dari pemerintah agar diarahkan pada pembangunan prasarana kampung yang jenis programnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar dipertimbangkan secara selektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya.

Khusus mengenai pembiayaan penyelenggara pembangunan masyarakat kampung terutama bersumber pada potensi kampung dimana perlu diminta bantuan dari pemerintah. Hal ini sehubungan dengan peraturan pemerintah No. 25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa sumber-sumber pembiayaan pembangunan masyarakat kampung dapat diperoleh juga dari:

- Swadaya masyarakat murni
 - Bantuan pemerintah daerah
 - Bantuan pemerintah pusat
- Bantuan lain-lain

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode penelitian

1. Penelitian kepustakaan, yakni mengadakan penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan-peraturan, karya ilmiah dan lain-lain yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.
2. Penelitian Lapangan :
 - a. Data primer, yakni usaha memperoleh data dari masyarakat dengan menggunakan daftar pertanyaan / kuisioner yang telah di susun sebelumnya.
Adapun cara pengumpulan data dengan Random Sampling yaitu sampel yang diambil secara acak, dimana dari setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Sedangkan sampel diambil 10% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 90 Kepala Keluarga responden, dimana secara uji statistik sampel tersebut telah mewakili/ representatif. (S. Nasution)
 - b. Data sekunder, yakni usaha memperoleh data dari lembaga/dinas instansi yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini terutama dari monografi Kampung Benda.
 - c. Observasi, yakni usaha memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung untuk mencatat secara sistematis tentang keadaan pembangunan Kampung Benda, guna memperkuat data yang diperoleh dari masyarakat.
3. Variabel dan pengukurannya
 - Pelaksanaan yaitu pemanfaatan semua Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) dari pemerintah. Batasan pengukurannya yaitu:
 - a). Baik : 17 – 24
 - b). Sedang : 9 – 16
 - c). Kurang : 1 – 8
 - Motivasi yaitu akibat adanya bantuan dari pemerintah kepada setiap desa/kampung dapat mengubah modal potensiil menjadi modal riil untuk membiayai pembangunan kampung.
Batasan pengukurannya yaitu :
 - a). Baik : 17 – 24
 - b). Sedang : 9 – 16
 - c). Kurang : 1 – 8
 - Sikap yaitu partisipasi/keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan Kampung. Batasan pengukurannya yaitu :
 - a). Baik : 17 – 24
 - b). Sedang : 9 – 16
 - c). Kurang : 1 – 8

3.2 Analisis Data

Dalam pembahasan masalah ini penulis menggunakan analisis Kuantitatif dan kualitatif. Untuk lebih jelasnya analisis tersebut di uraikan berikut ini :

1. Analisis Kuantitatif yaitu menggambarkan dan menguraikan hasil penelitian dengan bentuk angka-angka statistik.
2. Analisis Kualitatif yaitu menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dengan bentuk kalimat-kalimat.

Sedangkan data yang akan diolah menggunakan analisis tabel dengan uji Chi Square (X^2) yaitu :

$$X^2 = \sum_{j=1}^K \sum_{i=1}^B \frac{(n_{ij} - N_{ij})^2}{N_{ij}}$$

Dimana : X^2 nilai kuadrat chi yang dibutuhkan .

n_{ij} adalah frekuensi nyata melalui hasil penelitian .

N_{ij} adalah frekuensi yang diharapkan yang dihitung dengan rumus:

$$N_{ij} = \frac{n_{iO} \times n_{Oj}}{n} \quad \begin{matrix} j = \text{baris} \\ i = \text{kolom} \end{matrix}$$

Σ adalah sigma atau jumlah total

Bila nilai chi kuadratnya telah diperoleh maka selanjutnya dicari degrees of freedom (df) derajat kebebasan dengan rumus : $(B - 1)(K - 1)$.

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 1% dan 5%, maka nilai untuk masing- masing tingkat kepercayaan dan df dapat dilihat pada tabel tentang nilai-nilai kritis X^2 .

Untuk menguji hipotesis dengan jalan membandingkan nilai X^2 yang dihasilkan dengan tingkat kepercayaan dan df yang sesuai pada tabel nilai-nilai chi kuadrat.

HO di terima bila : $XO^2 \geq Xt^2$

HO di tolak bila : $XO^2 < Xt^2$

Analisis kotingensi yaitu digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara ketiga variabel tersebut, apakah hubungannya nyata atau hanya kebetulan saja.

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{X^2 + n}}$$

Keterangan :

C = keeratan hubungan keseluruhan

X^2 = nilai chi kuadrat yang kita peroleh

n = jumlah sampel atau responden

Analisis yang akan dilaporkan dalam penelitian ini berasal dari 90 kepala keluarga responden. Responden tersebut dipilih secara acak, data diperoleh dengan meminta semua responden untuk mengisi daftar pertanyaan yang terdiri dari bagian sebagai berikut :

1. Cara pengelolaan /pelaksanaan uang bantuan Kampung.
2. Ada motivasi dari ADK dan DD terhadap kesinambungan pembangunan Kampung.
3. Adanya sikap positif dari masyarakat terhadap pembangunan Kampung.

Untuk meningkatkan pelaksanaan dana bantuan Kampung dengan jalan menggunakan angka score yang penulis gunakan tiga point yaitu:

- a. Baik diberi score : 3
- b. Sedang diberi score : 2
- c. Kurang diberi score : 1

Untuk tingkat motivasi terhadap kesinambungan pembangunan terdiri dari tiga point pula yaitu:

- a. Baik diberi score : 3
- b. Sedang diberi score : 2
- c. Kurang diberi score : 1

Untuk tingkat sikap terdiri dari tiga point pula yang terdiri dari:

- a. Baik diberi score : 3
- b. Sedang diberi score : 2
- c. Kurang diberi score : 1

Dengan hasil data yang diperoleh maka dilakukan pengujian hipotesa dengan menggunakan X^2 .

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Responden

Berdasarkan hasil penelitian dari 90 responden terdapat 40 responden dari kelompok umur 10-54 dan 50 responden dari kelompok umur 55 tahun keatas.

Tabel 11. Kelompok umur dan pendidikan responden

Pendidikan	Kelompok umur						Jumlah	
	10-54	%	55 +	%	Jiwa	%		
SD	3	3,33	25	27,78	28	31,11		
SMP	15	16,67	20	22,22	35	38,89		
SMA	20	22,22	5	5,56	25	27,78		
Akademi	2	2,22	-	-	2	2,22		
Jumlah	40	44,44	50	55,56	90	100,00		

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil penelitian. 2015

Dari tabel 11, dapat terlihat bahwa 40 responden atau 44,44% dari jumlah responden yang diambil, kelompok umur 10-54 tahun, rata-rata berpendidikan SMP dan SMA, yaitu masing-masing tamat SMP 15 responden atau 16,67% dan tamat SMA 20 responden atau 22,22% sedangkan 50 responden atau 55,56% dari jumlah responden yang diambil, kelompok umur 55 tahun keatas rata-rata berpendidikan SD dan SMP yaitu, yaitu masing-masing:

- SD 25 responden atau 27,78%
- SMP 20 responden atau 22,22%

Tabel 12. Pengaruh Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) Terhadap Tingkat Pelaksanaan, Motivasi dan sikap, dari Kelompok Umur 10-54 tahun.

Tingkat	Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD)						Jumlah	
	Baik	%	Sedang	%	Kurang	%	Jiwa	%
Pelaksanaan	25	27,28	15	16,66	-	-	40	44,44
Motivasi	24	26,67	11	12,22	5	5,55	40	44,44
Sikap	28	31,11	9	10,10	30	3,33	40	44,44

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil penelitian. 2015

Untuk melihat pengaruh Alokasi Dana Kampung terhadap tingkat pelaksanaan, motivasi dan sikap dari kelompok umur 10-54 tahun, dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12, menunjukan pengaruh Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) terhadap tingkat pelaksanaan, motivasi dan sikap yang mana dari hasil penelitian diperoleh hasil :

Untuk jawaban baik yaitu masing-masing : Tingkat pelaksanaan 25 responden atau 27,78% dari jumlah responden yang diambil, tingkat motivasi 24 responden atau 26,67% dari jumlah responden yang diambil, dan kemudian untuk tingkat sikap 28 responden atau 31,11% dari jumlah responden yang diambil.

Untuk jawaban yang sedang yaitu masing-masing:

Tingkat pelaksanaan 15 responden atau 16,66% dari jumlah responden yang diambil, tingkat motivasi 11 responden atau 12,12% dari jumlah responden yang diambil, dan kemudian untuk tingkat sikap 9 responden atau 10,00% dari jumlah responden yang diambil.

Untuk jawaban kurang yaitu masing-masing:

Tingkat pelaksanaan sudah tidak ada lagi, untuk tingkat motivasi 5 responden atau 5,55%, kemudian untuk tingkat sikap 3 responden atau 3,33% dari jumlah responden yang diambil.

Tabel 13. Pengaruh Alokasi Dana Kampung terhadap tingkat pelaksanaan, motivasi dan sikap dari kelompok umur 55 tahun keatas.

Tingkat	Alokasi Dana Kampung						Jumlah	
	Baik	%	Sedang	%	kurang	%	Jiwa	%
Pelaksanaan	31	34,44	18	20,00	1	1,11	50	55,56
Motivasi	31	34,44	14	15,56	5	5,56	50	55,56
Sikap	34	37,78	11	12,22	5	5,56	50	55,56

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil penelitian. 2015

Untuk melihat pengaruh Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) terhadap tingkat pelaksanaan, motivasi dan sikap dari kelompok umur 55 tahun keatas dapat dilihat pada tabel 13. Tabel 13, menunjukan pengaruh Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) terhadap tingkat pelaksanaan, motivasi dan sikap, yang mana dari hasil penelitian diperoleh hasil:

Untuk jawaban baik yaitu masing-masing:

Tingkat pelaksanaan 31 responden atau 34,44% dari jumlah responden yang diambil, tingkat motivasi 31 responden atau 34,44% dari jumlah responden yang diambil, tingkat sikap 34 responden atau 37,78% dari jumlah responden yang diambil.

Untuk jawaban yang sedang yaitu masing-masing:

Tingkat pelaksanaan 18 responden atau 20,00% dari jumlah responden yang diambil, tingkat motivasi 14 responden atau 15,56% dari jumlah responden, kemudian tingkat sikap 11 responden atau 12,22% dari jumlah responden yang diambil.

Untuk jawaban yang kurang yaitu masing-masing:

Tingkat pelaksanaan 1 responden atau 1,11% dari jumlah responden yang diambil, tingkat motivasi 5 responden atau 5,55% dari jumlah responden yang diambil, kemudian untuk tingkat sikap 5 responden atau 5,56% dari jumlah responden yang diambil.

Jadi kalau kita lihat dari kedua pembagian kelompok umur responden tersebut ternyata variabel-variabel yang dianalisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pekerjaan dan penelitian, baik responden yang kelompok umur 10-54 tahun maupun dari kelompok umur 55 tahun keatas, mereka yang rata-rata memberikan jawaban baik yang sedang adalah mereka yang berpendidikan diatas SMP keatas. Sedangkan yang berpendidikan SD itu sebagian besar menyatakan sedang dan kurang.

4.2. Tingkat Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD)

Berdasarkan hasil penelitian dari 90 kepala keluarga responden dalam tingkat pengelolaan dana bantuan menunjukan bahwa 72,22% dari responden termasuk klasifikasi tingkat tinggi, 27,28% termasuk klasifikasi sedang dan kemudian yang menunjukan klasifikasi rendah tidak ada, hal ini dapat terlihat pada tabel 14 dibawah ini.

Tabel 14. Tingkat Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD)

Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD)	Jumlah	Prosentase
Tinggi	65	72,22
Sedang	25	27,78
Rendah	-	-
J U M L A H	90	100,00

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil penelitian.2015

4.3. Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) Terhadap Tingkat Pelaksanaan Pembangunan Kampung.

Tabel 15, merupakan hasil penelitian dari 90 kepala keluarga responden dalam tingkat pelaksanaan pembangunan, yang menunjukan bahwa 62,22% pelaksanaan pembangunan termasuk klasifikasi baik, 35,56% pelaksanaan pembangunan termasuk klasifikasi sedang dan kemudian 2,22% pelaksanaan pembangunan termasuk klasifikasi kurang.

Tabel 15. Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) Terhadap Tingkat Pelaksanaan Pembangunan Kampung.

Tingkat Pelaksanaan Dana Pembangunan Kampung Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD)	Jumlah	Prosentase
Baik	56	62,22
Sedang	32	35,56
Kurang	2	2,22
J u m l a h	90	100,00

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil penelitian.2015

4.4. Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) Mendorong Kesenambungan-Pembangunan Kampung.

Berdasarkan hasil penelitian dari 90 responden kepala keluarga responden menyatakan bahwa Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) mendorong kesinambungan pembangunan kampung, menunjukan bahwa 61,11% dari jumlah responden menyatakan termasuk klasifikasi baik, kemudian 27,78% termasuk klasifikasi sedang, dan kemudian 11,11% termasuk klasifikasi kurang, hal ini dapat dilihat pada tabel 16, dibawah ini.

Tabel 16. Sikap Masyarakat Terhadap Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) Dalam Pembangunan Kampung.

Sikap	J u m l a h	Prosentase
Baik	55	61,11
Sedang	25	27,78
Kurang	10	11,11
J u m l a h	90	100,00

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil penelitian. 2015

4.5. Sikap Positif Dari Masyarakat Kampung Terhadap Pembangunan Kampung

Berdasarkan hasil penelitian dari 90 Kepala Keluarga responden dari tingkat masyarakat kampung, menunjukan bahwa 68,89% termasuk klasifikasi baik, kemudian 22,22% termasuk klasifikasi sedang, dan kemudian 8,89% menyatakan termasuk klasifikasi kurang, hal ini dapat dilihat pada tabel 17, dibawah ini.

Tabel 17. Sikap Masyarakat Terhadap Pembangunan Kampung

Sikap masyarakat kampung	Jumlah	Prosentase
Baik	62	68,89
Sedang	20	22,22
Kurang	8	8,89
J u m l a h	90	100,00

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil penelitian. 2015

4.6. Analisis Data

Setelah diketahui tingkat pelaksanaan pembangunan kampung, Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) mendorong kesinambungan pembangunan kampung dan sikap positif dari masyarakat kampung terhadap pembangunan kampung. Maka dapatkah kita ketahui hubungan pelaksanaan terhadap Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD), hubungan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) terhadap kesinambungan pembangunan kampung, dan kemudian hubungan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) terhadap sikap positif dari masyarakat terhadap pembangunan kampung, yaitu dengan membuat tabel tingkat hubungan masing-masing.

4.6.1. Hubungan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD)

Berdasarkan hasil penelitian dari 90 Kepala Keluarga responden, pada tabel 15, menunjukkan bahwa hubungan dana pembangunan kampung dengan tingkat pelaksanaan pembangunan adalah 56 responden menyatakan baik, kemudian 32 responden menyatakan cukup, dan yang menyatakan kurang hanya 2 responden.

Sedangkan pada tabel 14, menunjukkan bahwa 65 responden menyatakan tingkat pengelolaan dana pembangunan adalah tinggi, kemudian yang menyatakan cukup yaitu 25 responden sedangkan yang menyatakan rendah sudah tidak ada lagi.

Tabel 18. Hubungan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) dengan Tingkat Pelaksanaan Pembangunan Kampung.

Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD)	Pelaksanaan Pembangunan kampung			Jumlah
	Baik	Sedang	Kurang	
Tinggi	56	-	2	58
Cukup	-	32	-	32
Rendah	-	-	-	-
Jumlah	56	32	2	90

Sumber: Data diolah berdasarkan Tabel 15.

Kemudian berdasarkan Tabel 18, diatas dapatlah dicari frekwensi harapan (Nij) sebagai berikut:

Nij (Frekwensi harapan)

$$N_{ij\ 1.1} = \frac{56 \times 58}{90} = 36,09$$

$$N_{ij\ 1.2} = \frac{56 \times 32}{90} = 19,90$$

$$N_{ij\ 1.3} = \frac{56 \times 0}{90} = 0$$

$$N_{ij\ 2.1} = \frac{32 \times 58}{90} = 20,62$$

$$N_{ij\ 2.2} = \frac{32 \times 32}{90} = 11,38$$

$$N_{ij\ 2.3} = \frac{32 \times 0}{90} = 0$$

$$N_{ij\ 3.1} = \frac{2 \times 58}{90} = 1,28$$

$$N_{ij\ 3.2} = \frac{2 \times 32}{90} = 0,71$$

$$N_{ij\ 3.3} = \frac{2 \times 0}{90} = 0$$

Untuk menguji statistiknya tentang hubungan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) dengan tingkat pelaksanaan pembangunan kampung dapat dilihat pada tabel 19, berikut ini:

Tabel 19. Hubungan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) dengan Tingkat Pelaksanaan Pembangunan Kampung (pengolahan dari tabel 18).

Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD)	nij	nij	(nij - nij)	(nij - nij) ²	(nij - nij) ² nij
1. Tinggi					
a. Baik	56	36,09	19,91	396,41	10,99
b. Sedang	0	19,90	-19,90	396,01	19,90
c. Kurang	0	0	0	0	0
2. Cukup					
a. Baik	0	-20,62	-20,62	425,14	20,62
b. Sedang	32	11,38	20,62	425,14	37,37
c. Kurang	0	0	0	0	0
3. Rendah					
a. Baik	0	1,28	-1,28	1,64	1,28
b. Sedang	0	0,71	-0,71	0,51	0,71
c. Kurang	2	0	2	4	0
Jumlah	90	0	0	0	90,87

Sumber: Data diolah berdasarkan Tabel 18.

χ^2 diambil dengan derajat kebebasan (db) 4, dengan taraf signifikasikan 5% atau 0,05 yaitu nilainya 9,49.

Jadi berdasarkan Tabel diatas maka dengan taraf signifikasi 0,05% pada db 4, menunjukkan bahwa χ^2 Tabel atau χ^2 hitung $90,87 >$ dari χ^2 Tabel 9,49 atau $\chi^2_0 > \chi^2_t$, dari hasil penelitian tersebut ternyata bahwa hubungan Alokasi Dana Kampung

(ADK) dan Dana Desa (DD) dengan tingkat pelaksanaan pembangunan kampung mempunyai hubungan dan berpengaruh sangat nyata.

4.6.2. Hubungan Alokasi Dana Kampung (ADK) Dan Dana Desa (DD) Dengan Tingkat Kesenambungan Pembangunan Kampung.

Berdasarkan hasil penelitian dari 90 kepala keluarga responden, pada tabel 14, dimuka menunjukkan bahwa 65 responden dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) termasuk klasifikasi tinggi, kemudian yang menyatakan sedang 25 responden, dan sedangkan yang menyatakan rendah sudah tidak ada lagi. Sedangkan pada tabel 16, menunjukkan bahwa hubungan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) dengan tingkat kesinambungan menyatakan baik yaitu 55 responden, kemudian 10 responden menyatakan kurang dan yang menyatakan cukup yaitu 25 responden.

Tabel 20. Hubungan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) dengan kesinambungan Pembangunan Kampung.

Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD)	Pelaksanaan Pembangunan Kampung			Jumlah
	Baik	Sedang	Kurang	
Tinggi	55	-	10	65
Cukup	-	25	-	25
Rendah	-	-	-	-
Jumlah	55	25	10	90

Sumber: Data diolah berdasarkan Tabel 14 dan 16.

Kemudian berdasarkan tabel 20, dapatlah dicari Frekwensi harapan (Nij) sebagai berikut:

Nij (Frekwensi harapan)

$$N_{ij} 1.1. = \frac{55 \times 65}{90} = 39,72$$

$$N_{ij} 1.2. = \frac{55 \times 25}{90} = 15,28$$

$$N_{ij} 1.3. = \frac{55 \times 0}{90} = 0$$

$$N_{ij} 2.1. = \frac{25 \times 65}{90} = 18,85$$

$$N_{ij} 2.2. = \frac{25 \times 25}{90} = 6,94$$

$$N_{ij} 2.3. = \frac{25 \times 0}{90} = 0$$

$$N_{ij} 3.1. = \frac{10 \times 65}{90} = 7,22$$

$$N_{ij} 3.2. = \frac{10 \times 25}{90} = 2,78$$

$$N_{ij} 3.3. = \frac{10 \times 0}{90} = 0$$

Untuk menguji statistiknya tentang hubungan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) dengan kesinambungan pembangunan kampung dapat dilihat pada tabel 21, berikut ini:

Tabel 21. Hubungan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) dengan Tingkat kesinambungan Pembangunan Kampung, (pengolahan dari tabel 20).

Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD)	Nij	Nij	(Nij - Nij)	(Nij - Nij) ²	(Nij - Nij) ² Nij
1. Tinggi					
a. Baik	55	39,72	15,28	233,44	5,87
b. Sedang	0	15,28	-15,28	233,44	15,28
c. Kurang	0	0	0	0	0
2. Cukup					
a. Baik	0	18,05	-18,05	325,14	18,05
b. Sedang	25	6,94	18,06	326,14	46,97
c. Kurang	0	0	0	0	0

3. Rendah						
a. Baik	: 0	: 7,22	: -7,22	: 52,14	: 7,22	
b. Sedang	: 0	: 2,78	: -2,78	: 7,74	: 2,77	
c. Kurang	: 10	: 0	: 10	: 100	: 0	
J u m l a h	: 90	: 90	: 0	: 0	: 96,16	

Sumber: Data diolah berdasarkan tabel 20.

Dari perhitungan diatas dengan uji statistik X^2 dengan taraf signifikansi 0,05 pada derajat kebebasan (db) 4 – maka hasil X^2 hitung adalah 96,16 yaitu lebih besar dari X^2 tabel yaitu 9,49 atau dengan kata lain X^2 hitung $96,16 > X^2$ tabel 9,49 atau $X^2_0 > X^2_t$.

Dari hasil penelitian tersebut ternyata bahwa hubungan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) dengan tingkat kesinambungan pembangunan kampung mempunyai hubungan dan pengaruh sangat nyata.

Tabel 22. Hubungan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) terhadap Sikap Masyarakat dalam Pembangunan Kampung.

Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD)	Sikap Masyarakat dalam pembangunan kampung			Jumlah
	Baik	Sedang	Kurang	
Tinggi	62	-	8	70
Cukup	-	20	-	20
Rendah	-	-	-	-
J u m l a h	62	20	8	90

Sumber: Data diolah berdasarkan Tabel 17.

Kemudian berdasarkan tabel 22 diatas dapatlah dicari Frekwensi harapan (N_{ij}) sebagai berikut:

N_{ij} (Frekwensi harapan).

$$N_{ij} 1.1. = \frac{62 \times 70}{90} = 48,22$$

$$N_{ij} 1.2. = \frac{62 \times 20}{90} = 13,76$$

$$N_{ij} 1.3. = \frac{62 \times 0}{90} = 0$$

$$N_{ij} 2.1. = \frac{20 \times 70}{90} = 15,56$$

$$N_{ij} 2.2. = \frac{20 \times 20}{90} = 4,44$$

$$N_{ij} 2.3. = \frac{20 \times 0}{90} = 0$$

$$N_{ij} 3.1. = \frac{8 \times 70}{90} = 6,22$$

$$N_{ij} 3.2. = \frac{8 \times 20}{90} = 1,78$$

$$N_{ij} 3.3. = \frac{8 \times 0}{90} = 0$$

Dan untuk melihat uji statistiknya tentang hubungan pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) dengan sikap masyarakat dalam pembangunan di Kampung Bendadapat dilihat pada tabel 23 berikut ini:

Tabel 23. Perhitungan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) terhadap sikap masyarakat dalam Pembangunan Kampung.

Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD)	Ni	Nij	(Nij - Nij)	(Nij - Nij) ²	(Nij - Nij) ² / Nij
1. Tinggi					
a. Baik	62	48,22	13,78	189,88	3,94
b. Sedang	0	13,78	-13,78	189,88	13,78
c. Kurang	0	0	0	0	0
2. Cukup					
a. Baik	0	15,56	-15,56	242,16	15,56
b. Sedang	20	4,44	15,56	242,16	54,54
c. Kurang	0	0	0	0	0
3. Rendah					
a. Baik	0	6,22	-6,22	38,64	6,22
b. Sedang	0	1,78	-1,78	3,14	1,78
c. Kurang	8	0	8	64	0
J u m l a h	90	90	0	0	95,72

Sumber: Data diolah berdasarkan Tabel 22

Dari perhitungan diatas dengan uji statistik X^2 dengan taraf signifikansi 0,05 pada db 4 maka terdapat hasil X^2 hitung yaitu 95,82 dimana lebih besar dari X^2 tabel yaitu 9,49 atau X^2 hitung $95,82 > X^2$ tabel 9,49 atau dengan kata lain $X^2_o > X^2_t$.

Dari hasil penelitian tersebut ternyata bahwa hubungan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) dengan tingkat sikap masyarakat dalam pembangunan kampung mempunyai hubungan pengaruh sangat nyata.

Setelah kita ketahui sama hasil perhitungan dari ketiga hipotesis tersebut diatas, dimana terdapat pengaruh atau hubungan yang nyata dalam pelaksanaan pembangunan di Kampung BendaKecamatan Benda Kabupaten Tangerang.

Adapun kesimpulan dari pengujian hipotesis diatas yaitu hasil-hasil perhitungan X^2 dapat dilihat sebagai berikut:

- PELAKSANAAN
 $X^2_o > X^2_t = 90,87 > 9,49$
- KESINAMBUNGAN
 $X^2_o > X^2_t = 96,16 > 9,49$
- SIKAP
 $X^2_o > X^2_t = 95,82 > 9,49$

Dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan mempunyai hubungan atau pengaruh yang nyata terhadap kesinambungan dan sikap positif masyarakat dalam keikutsertaan dalam pembangunan di Kampung BendaKecamatan BendaKabupaten Tangerang.

Kemudian untuk melihat secara keseluruhan pengaruh ataupun hubungan dari semua variabel yang dianalisa diatas yaitu Variabel pelaksanaan motifasi dan sikap yang dapat dilihat pada koefisien Kontengensi dengan rumus:

$$C = \frac{X^2}{X^2 + N}$$

Hasil X^2 (Chi Square) yang diperoleh dari pengolahan yaitu :

$$90,87 + 96,16 - 95,82 = 282,85$$

Nilai Chiquare yang di rata-rata adalah :

$$\frac{282,85}{5} = 94,28$$

Dan jika hasil tersebut disubstitusikan kepada rumus koefisien kotengensi diatas maka :

$$C = \sqrt{\frac{94,28}{94,28 + 90}}$$

$$C = \sqrt{\frac{94,28}{184,28}}$$

$$C = \sqrt{0,5116127}$$

$$C = 0,715271$$

$$C = 0,72$$

Oleh karena koefisiensi kontengensinya cukup tinggi yaitu lebih dari setengah ($\frac{1}{2}$) maka disini jelas hubungannya atau pengaruh yang nyata bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) dapat meningkat terhadap kesinambungan dan sikap positif masyarakat dalam pembangunan di Kampung BendaKecamatan BendaKabupaten Tangerang.

Berdasarkan hasil perhitungan X^2 dari masing-masing variabel, menunjukan angka yang positif, dimana lebih besar dari X^2 tabel yaitu:

$$\begin{array}{l} \text{Untuk tingkat pelaksanaan } X^2_o > X^2_t = 90,87 > 9,49 \\ \text{Untuk tingkat kesinambungan } X^2_o > X^2_t = 96,16 > 9,49 \\ \text{Untuk tingkat sikap } X^2_o > X^2_t = 95,82 > 9,49 \end{array}$$

Jadi secara statistik berarti ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan yang penulis maksudkan adalah Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) di Kampung BendaKecamatan BendaKabupaten Tangerang.

Dan ini diperkuat lagi koefisiensi kontengensinya (C) yang cukup tinggi pula yaitu 0,72 (lebih dari 0,05%). Jadi hubungan atau pengaruh yang terjadi dari ketiga variabel tersebut bukan merupakan kebetulan saja, melainkan benar-benar merupakan hubungan atau pengaruh yang nyata.

Dari uraian diatas masalah yang timbul dari Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) dikampung Benda, menurut penulis berdasarkan pengamatan adalah masyarakat yang masih juga belum sepenuhnya mengerti akan hakekat dari pada tujuan pemberian Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) dari pemerintah tersebut. Keadaan ini menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya aktif dalam pelaksanaan pembangunan kampungnya. Hal ini terlihat pula pada koefisiensi kontengensinya yang belum begitu tinggi yaitu 72%.

Sehingga dengan demikian pembangunannya belum begitu berhasil dan dilain pihak untuk mendorong partisipasi masyarakat, aparat desa bersama-sama dengan pemerintah setempat telah berusaha sepenuhnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut, terutama melalui penyuluhan serta menyusun program pembangunan kampung dengan baik melalui musyawarah.

Dengan melihat hasil perhitungan X^2 koefisiensi kontengensinya dari variabel-variabel menunjukkan hubungan yang erat dengan koefisien kontengensi 72% sedangkan 28% dipengaruhi oleh hal-hal lain. Hal ini diduga karena masyarakat belum sepenuhnya memahami akan tujuan dan hakekat dari pada pemberian Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) tersebut dari pemerintah.

Untuk menanggulangi masalah tersebut menurut penulis yaitu dengan jalan meningkatkan pemberian penerangan ataupun penyuluhan kepada masyarakat, baik golongan pemuka masyarakat, Alim Ulama, Cendikiawan-cendikiawan, pemuda dan lainnya, agar supaya masyarakat benar-benar sadar tentang maksud dan tujuan pembangunan itu. Dilain pihak pemerintah hendaknya dapat meningkatkan pemberian Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) setiap tahunnya, karena ini akan merangsang masyarakat kampung untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan kampungnya masing-masing.

Dan kalau ini semua berjalan dengan baik tentu pembangunan kampung akan dapat ditingkatkan sesuai dengan yang diharapkan. dengan demikian pembangunan kampung akan berhasil sesuai dengan tujuan pembangunan negara yaitu menuju masyarakat adil dan makmur.

BAB V PENUTUP

Dari data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa, maka dapat disimpulkan antar lain:

1. Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dan dapat bermanfaat sesuai dengan harapan pemerintah, hal ini terlihat dengan nyata yaitu dari hasil penelitian 72,22% dilaksanakan dengan baik.
2. Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) dari pemerintah mempunyai pengaruh yang nyata terhadap tingkat pelaksanaan pembangunan kampung, yaitu dengan taraf signifikan 5% hubungan atau pengaruh yang dicapai X^2 hitung > dari X^2 tabel atau X^2 hitung 90,87 > X^2 tabel 9,49.
3. Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) dari pemerintah mendorong kesinambungan pembangunan kampung dengan baik, yang mempunyai pengaruh atau hubungan yang nyata, terbukti dengan taraf signifikan 5% hubungan yang dicapai X^2 tabel atau X^2 hitung 96,16 > X^2 tabel 9,49.
4. Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) dari pemerintah dapat memberikan sikap positif dari masyarakat kampung terhadap pembangunan, ini terlihat dengan taraf signifikan 5% maka pengaruh atau hubungan yang dicapai X^2 hitung lebih besar dari nilai X^2 tabel yaitu X^2 hitung 95,82 > X^2 tabel 9,49
5. Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) dari pemerintah selalu diharapkan, guna untuk memberi rangsangan terhadap masyarakat untuk menumbuhkan tingkat partisipasi serta swadaya masyarakat kampung dalam menunjang pembangunan kampung. Dimana Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) tersebut terbukti menunjang pelaksanaan pembangunan kampung, kemudian mendorong kesinambungan dan dapat memberikan sikap positif masyarakat kampung dalam pembangunan kampungnya.

DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirjo, Prajudi, 1997, *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi Dan Manajemen Umum*, Seri Pustaka, Jakarta.

Direktorat Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Departemen Dalam Negeri, 1982, *Manual Administrasi Pendapatan Daerah*, Jili II-A.

Bintoro Tjokroamidjojo, 1978, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.

Himpunan Peraturan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Jilid I, Jakrata.

Irawan Soejito, 1984, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta.

Ibnu Syamsi, 1983, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.

J. Supranto, 1985, *Ekonometrika I*, LP3ES, Jakarta.

Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Utara, *Laporan Tahun 2004*.

Munawir S, 1983, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Bina Aksara, Jakarta.

Pamuji S, 1983, *Dasar-Dasar Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22 Tahun 2000, *Tentang Pemungutan Retribusi Hasil Hutan pada Masyarakat*.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 *Tentang Retribusi Daerah*.

Rahmat Sumitro, 1984, *Perpajakan*, Bina Aksara, Jakarta

Suparmo. M, 1989, *Perencanaan Pembangunan*, Eresco, Bandung

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.

Siagian, Sondang, 1982, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.

Soedargo, 1964, *Pajak Daerah-Daerah dan Retribusi Daerah*, Eresco, Bandung.

Soetrisno PH, 1986, *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, FE-UGM, Yogyakarta.

Sadono, Sukirno, 1985, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Gunung Agung, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintah Daerah*.